



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

[SIARAN PERS]

Nomor: 002/RILIS/BKN/II/2024

Jakarta, 13 Februari 2024

Mulai Tahun 2024

Akreditasi Lembaga Penilaian Potensi dan Kompetensi Berlaku PNBP

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberlakukan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam kegiatan akreditasi/re-akreditasi bagi Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Penilaian Kompetensi selain pada instansi pemerintah mulai tahun 2024. Pemberlakuan tarif ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BKN. Adapun biaya yang dikenakan bagi instansi yang mengajukan akreditasi/re-akreditasi sebesar Rp. 20.060.000 (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah), di mana biaya ini sudah meliputi seluruh pelaksanaan penyelenggaraan akreditasi yang termasuk dalam unsur PNBP.

Terhitung hingga Desember 2023, terdapat 54 Lembaga Penilaian Kompetensi baik pada Instansi Pemerintah dan selain Instansi Pemerintah yang telah mendapat pengakuan kelayakan atau terakreditasi oleh BKN. Akreditasi penyelenggara penilaian kompetensi yang dilakukan BKN terhadap Instansi Pemerintah dan selain Instansi Pemerintah bertujuan sebagai penegakan standar untuk menjamin kualitas penyelenggaraan penilaian kompetensi bagi ASN sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi.

Terdapat 4 (empat) kategori masa berlaku akreditasi, yakni Lembaga Penilaian Kompetensi dengan kategori A memiliki masa berlaku 5 tahun, kategori B berlaku 3 tahun, dan kategori C dan D berlaku selama 2 tahun. Bagi Lembaga Penilaian Kompetensi yang masa berlakunya telah habis atau bagi yang akan mengajukan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

permohonan akreditasi/re-akreditasi dapat mengajukannya melalui tautan bit.ly/AkreditasiPenkomBKN atau dapat mengirimkan surat elektronik melalui email puspenkom.asn@bkn.go.id.

Berikut ini daftar Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang telah terakreditasi BKN termasuk masa berlakunya akreditasinya.

TABEL DAFTAR PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI TERAKREDITASI

NO	NAMA INSTANSI	UNIT	KATEGORI	PIMPINAN	MASA BERLAKU
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Balai Penilaian Kompetensi	A	Kepala Balai Penilaian Kompetensi Kementerian PUPR	2019 - 2024
2.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Subbagian Penilaian Kompetensi	A	Kepala Subbagian Penilaian Kompetensi	2019 - 2024
3.	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	Balai Pengukuran Kompetensi	A	Kepala Balai Pengukuran Kompetensi D.I.Y.	2019 – 2024
4.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Unit Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara	A	Kepala Unit Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara	2019 – 2024
5.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Unit Pelaksana Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi	A	Kepala Unit Pelaksana Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi	2019 – 2024
6.	Pemerintah Kota Bandung	Subbidang Pengembangan Karir Kota Bandung	A	Kepala Subbidang Pengembangan Karir	2023 – 2028
7.	Kementerian Dalam Negeri	Pusat Penilaian Kompetensi Kementerian Dalam Negeri	A	Kepala Biro Kepegawaian	2020 – 2025

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



NO	NAMA INSTANSI	UNIT	KATEGORI	PIMPINAN	MASA BERLAKU
8.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi	2020 – 2025
9.	Kementerian Keuangan	Sub Bagian Assessment Center, Bagian Pengembangan SDM Biro SDM Sekretariat Jenderal	A	Kepala Subbagian Assessment Center	2020 – 2025
10.	Lembaga Administrasi Negara	Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN	A	Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN	2020 – 2025
11.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan SDM, Biro Umum dan SDM	B	Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan SDM	Tidak memperbarui Akreditasi
12.	Pemerintah Provinsi Riau	UPT Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	A	Kepala UPT Penilaian Kompetensi	2020 – 2025
13.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Sub Bidang Penilaian Kompetensi, Bidang Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Daerah	A	Kepala Sub Bidang Penilaian Kompetensi	2020 – 2025
14.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK) Badan	B	Kepala UTPB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi	2023 – 2026

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



NO	NAMA INSTANSI	UNIT	KATEGORI	PIMPINAN	MASA BERLAKU
		Kepegawaian Daerah			
15.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sub Bidang Penilaian Kompetensi dan Kinerja Bidang Pengembangan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah	A	Kepala Sub Bidang Penilaian Kompetensi dan Kinerja	2020 – 2025
16.	Badan Pemeriksa Keuangan	Biro Sumber Daya Manusia	A	Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja	2021 – 2026
17.	Mahkamah Agung	Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center)	A	Kepala Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center)	2023 – 2028
18.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	Bidang Penilaian Kompetensi SDM Aparatur	B	Kepala Bidang Penilaian Kompetensi	2021 – 2024
19.	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Biro Kepegawaian dan Organisasi	B	Analis SDM Aparatur Madya / Koordinator Pengembangan Pegawai	2021 – 2024
20.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Biro Sumber Daya Manusia	B	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	2021 – 2024
21.	Kementerian Pertahanan	Assessment and Development Center	A	Kepala Bagian Karier Kepegawaian Roprog Setjen Kemhan	2021 – 2026
22.	Kementerian Kesehatan	Pusat Pelatihan SDM Kesehatan	A	Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan	2021 – 2026

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



NO	NAMA INSTANSI	UNIT	KATEGORI	PIMPINAN	MASA BERLAKU
23.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Unit Layanan Assessment Center	B	Assessor SDM Aparatur Madya/Koordinator Bidang Pengembangan Pegawai, Perencanaan Anggaran dan SDM	2021 – 2024
24.	Badan POM	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	A	Kepala Pusat Pengembangan SDM POM	2021 – 2026
25.	Badan Siber dan Sandi Negara	Biro Organisasi dan SDM	A	Kepala Biro OSDM	2021 – 2026
26.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai	A	Kepala UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai	2021 – 2026
27.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Subbidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Pegawai	B	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur	2021 – 2024
28.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	A	Kepala UPTD	2021 – 2026
29.	Pemerintah Provinsi Bali	UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai	A	Kepala UPTD.	2021 – 2026
30.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Penilaian Kompetensi Pegawai	A	Kepala UPT Penilaian Kompetensi Pegawai	2021 – 2026
31.	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi	B	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi	2021 – 2024
32.	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	UPTD. Penilaian Kompetensi ASN	A	Kepala UPTD. Penilaian Kompetensi ASN	2021 – 2026
33.	Pemerintah Kota Tangerang	UPT Penilaian Kompetensi	A	Kepala UPT Penilaian Kompetensi	2021 – 2026

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



NO	NAMA INSTANSI	UNIT	KATEGORI	PIMPINAN	MASA BERLAKU
34.	Pemerintah Kota Bekasi	Subbidang Pengembangan Karir Aparatur	B	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur	2023 – 2026
35.	Pemerintah Kota Yogyakarta	UPT Penilaian Kompetensi Pegawai BKPSDM Kota Yogyakarta	A	Kepala UPT Penilaian Kompetensi Pegawai BKPSDM	2021 – 2026
36.	Pemerintah Kota Palembang	BKPSDM Kota Palembang	B	Kepala BKPSDM Kota Palembang	2023 – 2026
37.	Universitas Lampung	Divisi Asesmen Center, UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan	B	Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan	2023 – 2026
38.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Pusat Layanan Psikologi	B	Ketua Pusat Layanan Psikologi Fakultas Psikologi UIN	2021 – 2024
39.	Universitas Negeri Makassar	Pusat Layanan Psikologi Fakultas Psikologi UNM	B	Ketua Pusat Layanan Psikologi Fakultas Psikologi UNM	2021 – 2024
40.	Universitas Negeri Padang	UPT Layanan Psikologi Universitas Negeri Padang	B	Kepala Divisi Assessment Center, Psikotes, dan Pengembangan Organisasi	2022 – 2025
41.	Universitas 11 Maret	Divisi Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Universitas Sebelas Maret	A	Ketua Divisi Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Universitas Sebelas Maret	2022 – 2027
42.	Universitas Hasanuddin	Pusat Layanan Psikologi Universitas Hasanuddin	B	Kepala Pusat Layanan Psikologi Universitas Hasanuddin	2022 – 2025
43.	BKPSDM Kabupaten Tegal	UPTD Penilaian Kompetensi ASN pada BKPSDM	B	Kepala UPTD Penilaian Kompetensi ASN pada BKPSDM Kabupaten Tegal	2022 – 2025

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



NO	NAMA INSTANSI	UNIT	KATEGORI	PIMPINAN	MASA BERLAKU
		Kabupaten Tegal			
44.	Badan Pusat Statistik	Pusat Penilaian Kompetensi pada Biro Sumber Daya Manusia BPS	B	Kepala Biro SDM	2022 – 2025
45.	Kementerian Sekretariat Negara	Assessment Center Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Sekretariat Negara	A	Kepala Biro SDM	2022 – 2027
46.	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara	Dinas Psikologi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara	A	Kasubdis Yanpsi	2022 – 2027
47.	Universitas Indonesia	Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia	A	Direktur LPTUI	2022 – 2027
48.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Biro Binkar SSDM	A	Kepala Bagian Penilaian Kompetensi Biro Binkar SSDM Polri	2022 – 2027
49.	Kementerian Lingkungan Hidup	Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B	Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	2022 – 2025
50.	Kementerian Sosial	<i>Assessment and Development Center</i>	B	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial	2023 – 2026
51.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara	B	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	2023 – 2026
52.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Unit	B	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	2023 – 2026

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE



NO	NAMA INSTANSI	UNIT	KATEGORI	PIMPINAN	MASA BERLAKU
		Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK)		Provinsi Nusa Tenggara Barat	
53.	Pemerintah Kabupaten Cirebon	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon	2023 – 2026
53.	Pemerintah Kota Balikpapan	Subbidang Kompetensi dan Kinerja	A	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan	2023 – 2028
54.	Universitas Sumatera Utara	Pusat Penilaian Kompetensi Universitas Sumatera Utara	B	Rektor Universitas Sumatera Utara	2023 – 2026

Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
 Hukum, dan Kerja Sama
 Badan Kepegawaian Negara

~